

MORFOLOGI KOTA BANDUNG PADA ABAD XX: PERSPEKTIF HISTORIS

Miftahul Falah

Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran
miftahul.falah@unpad.ac.id

Abstrak

Kota Bandung merupakan salah satu kota penting sejak masa penjajahan Belanda. Berawal dari sebuah kampung, Bandung kemudian berkembang seiring dengan kedudukannya sebagai pusat pemerintahan. Penelitian terhadap perkembangan Bandung sudah banyak dilakukan. Namun, aspek morfologis dari pertumbuhan Kota Bandung belum dikaji secara mendalam. Bagaimana pertumbuhan Kota Bandung pada Abad XX ditinjau dari aspek morfologi kota yang mencakup masalah kependudukan dan luas wilayah, areal terbangun, dan simbol kota? Untuk menjawab pertanyaan itu, dilakukan penelitian historis dengan menerapkan metode sejarah yang meliputi empat tahap, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, secara morfologis terdapat hubungan yang erat antara pertambahan penduduk dan perluasan wilayah kota; kedua, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan wilayah, areal terbangun menjadi semakin meluas; ketiga, simbol-simbol kota yang mencakup tugu atau monumen, nama jalan, gerbang kota, dan bangunan menunjukkan ciri/karakter Kota Bandung sesuai dengan jiwa zaman (*zeitgeist*)-nya. **Kata kunci:** kota Bandung, penduduk, areal terbangun, ruang terbuka, simbol kota

Abstract

Bandung is one of the important cities since the Dutch colonial period. Starting from a village, Bandung then developed along with its position as a center of government. Research on the development of Bandung city has been done, but the morphological aspects of the growth of Bandung city have not been studied in depth yet. How is the growth of Bandung city in 20th century in terms of morphological aspects of the city that includes demographic land area, city planning problems, built up area, and the symbol of the city? The method used in this reasearch is historical method that deals with four steps, namely heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results show that, first, morphologically there is a close relationship between population growth and the expansion of urban areas; second, along with population growth and the expansion of urban areas, the built up area becomes even more widespread; third, urban symbolism that includes pillar or monument, street name, city gates, and buildings show traits or characters of Bandung in accordance with zeitgeist. **Keywords:** city of Bandung, demography, built up Area, open space, urban symbolism

I PENDAHULUAN

Kota Bandung termasuk salah satu kota tua di Jawa Barat yang berdasarkan sumber arsip difungsikan sebagai sebuah kota pusat pemerintahan Kabupaten Bandung pada 25 September 1811 (Hardjasaputra dkk., 1999: 55). Pada awalnya, pemindahan tersebut tidak ditujukan untuk mendirikan sebuah pemerintahan kota, tetapi terkait dengan pembangunan Jalan Raya Pos (*DeGrote Posweg*) yang dilakukan

oleh Daendels. Jalan raya tersebut dibangun dari Anyer sampai Panarukan dan melewati Kabupaten Bandung. Akan tetapi, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung yang terletak di Krapyak berjarak sekitar 11 kilometer dari jalan raya pos. Oleh karena itu, untuk kepentingan pengawasan dan penanaman tanaman wajib, pada 25 Mei 1810, Daendels mengirim surat kepada Bupati Bandung perihal perintahnya untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung ke sekitar Sungai Cikapundung, tidak jauh dari lokasi pembangunan jalan raya pos (van der Chijs, 1880; Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 1974:116).

Pada saat pembuatan jalan raya sudah melintasi Sungai Cikapundung, di sekitar alun-alun Bandung sekarang, Daendels datang ke tempat itu untuk melakukan inspeksi. Pada saat itu, hadir pula Bupati Bandung, Raden Adipati Wiranatakusumah II. Daendels berjalan ke arah timur dan berhenti di sekitar Gedung PU sekarang, kemudian menancapkan tongkatnya sambil berkata "*zorg, dat als ik terug kom hier een stad is gebouwd*" 'usahakanlah, bila saya datang kembali, sebuah kota telah dibangun di sini' (Kunto, 2008: 14; Hardjasaputra dkk., 1999: 53). Tempat itu kemudian dijadikan sebagai kilometer 0 Kota Bandung. Meskipun Daendels menghendaki pemindahan pendopo kabupaten ke tempat ketika ia bicara, R. A. Wiranatakusumah II tidak memenuhi harapan Daendels tersebut. Ia lebih memilih tempat yang berlokasi di sebelah Barat Sungai Cikapundung karena dianggap lebih strategis dan yang lebih penting dan sesuai dengan kepercayaan masyarakat pada waktu itu (Hardjasaputra (dkk.), 1999: 54.). Setelah itu, Bupati Bandung mengerahkan ratusan penduduk untuk membuka hutan di sekitar daerah tersebut. Kemudian dibangunlah pendopo Kabupaten Bandung, di sebelah Barat Sungai Cikapundung, beberapa menit jalan kaki dari tempat di mana Daendels menancapkan tongkatnya. Di sekitar pendopo ini dibangun menjadi pusat sebuah kota yang lamakelamaan berkembang. Itulah yang kelak menjadi Kota Bandung (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 1974:117).

Setelah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, kota ini berkembang dengan pesat. Selain sebagai pusat pemerintahan, Kota Bandung kemudian tumbuh menjadi pusat kebudayaan mengingat banyak orang Belanda, khususnya dari para pemilik perkebunan yang menjadikan Kota Bandung sebagai tempat peristirahatan mereka. Lambat laun, pertumbuhan Kota Bandung semakin pesat seiring dengan pembangunan berbagai prasarana dan sarana perkotaan. Pada pertengahan Abad XIX, tepatnya pada 7 Agustus 1864, Kota Bandung semakin penting kedudukannya karena ditetapkan sebagai ibukota Keresidenan Priangan menggantikan Cianjur.¹ Pada akhir abad XIX, lahir wacana untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Wacana ini diikuti oleh penetapan Bandung sebagai pusat pertahanan militer Hindia Belanda sehingga menjadi kedudukan Panglima Perang Hindia Belanda. Di lain pihak, terhadap wacana itu, pada 1917, Pemerintah Gemeente Bandung mengajukan proposal pembangunan kawasan Bandung Utara sebagai pusat Pemerintahan Hindia Belanda dengan Gedung Sate sebagai sentralnya (Tarigan dkk, 2016: 103). Meskipun perpindahan ibukota Hindia Belanda urung dilaksanakan, Bandung telah tumbuh sebagai sebuah kota pegunungan yang begitu menarik untuk dikunjungi. Seiring

¹Gagasan awal perpindahan ibu kota Keresidenan Priangan dari Cianjur dilontarkan oleh Residen Steinmetz. Pada 1856, Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahud mengajukan usulan perpindahan ibu kota Keresidenan Priangan kepada Pemerintah Kerajaan Belanda, namun tidak mendapat tanggapan. Delapan tahun kemudian (1864), Gubernur Jenderal Pahud menerbitkan *Besluit* Nomor 18 Tanggal 7 Agustus 1864 yang menetapkan Bandung sebagai ibu kota Keresidenan Priangan menggantikan Cianjur (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1864/18; de Klein, 1931: 92; *Regeeringsalmanak voor NL*, 1864: 154; Muhsin, 2011).

dengan itu, Bandung ditetapkan sebagai sebuah *gemeente* pada 1906 kemudian menjadi *staadsgemeente* pada 1926 (*Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng over de Jaren 1906/1918, 1919: 1; Staatsblad van Nederlandsch-Indie Jaar 1926 Nummer 365*).

Kota Bandung kemudian semakin berkembang sehingga memerlukan penangan yang serius. Untuk itu, Pemerintah *Staadsgemeente* Bandung menugasi Thomas Karsten untuk menyusun rencana induk pengembangan Kota Bandung. Hasilnya berupa Karsten Plan (1930) yang merencanakan tata ruang Kota Bandung untuk 25 tahun ke depan (1930-1955) dengan rencana wilayah pengembangan seluas 3.305 hektar (Tarigan dkk, 2016: 103). Akan tetapi, Karsten Plan tersebut tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya karena pecah Perang Dunia II. Ketika Indonesia merdeka, masalah penataan perkotaan mengalami kekosongan sehingga pertumbuhan Kota Bandung menjadi tidak terkendali (Wawancara dengan Ridwan Kamil, Maret 2016 di Balai Kota Bandung). Pokok masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pertumbuhan Kota Bandung pada Abad XX ditinjau dari aspek morfologi kota? Untuk menjawab pertanyaan itu, dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu 1) bagaimana pertumbuhan penduduk Kota Bandung? Bagaimana perubahan dan untuk apa areal terbangun Kota Bandung? dan 2) bagaimana simbol-simbol kota menunjukkan karakter Bandung sebagai kota kreatif?

Tidak dapat dimungkiri bahwa pertumbuhan Kota Bandung sudah banyak diteliti, baik yang dilakukan oleh para peminat sejarah maupun sejarawan akademis. Haryoto Kunto pada 1985 menerbitkan buku berjudul *Wajah Bandung Tempo Doeloe* dan pada 1986 menerbitkan buku berjudul *Semerbak Bunga di Kota Bandung*. Kedua buku yang diterbitkan oleh Granesia sangat kaya dengan data Kota Bandung seperti bangunan, jaringan transportasi, peristiwa-peristiwa tertentu, dan sebagainya meskipun penulisnya seorang planolog. Buku ini lebih menceritakan kisah perjalanan Kota Bandung yang eksotik sehingga tidak memfokuskan pada kajian morfologi kota. Namun demikian, sebagai sumber sekunder, buku ini sangat penting untuk memahami pertumbuhan Kota Bandung secara global. Pada 1999, penulis ikut terlibat dalam penelitian sejarah Kota Bandung yang dipimpin oleh A. Sobana Hardjasaputra. Hasil penelitian diterbitkan secara terbatas oleh Pemkot Bandung dengan judul *Sejarah Kota Bandung Periode 1906-1945*. Dalam buku itu diuraikan perkembangan Kota Bandung sejak 1906 ketika ditetapkan sebagai *gemeente*, sampai tahun 1945, ketika Indonesia merdeka dan Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu kotapraja. Meskipun menunjukkan kisah sejarah yang ditulis secara ilmiah, aspek morfologi kota tidak dikaji dalam penelitian tersebut.

Pada 2006, Kiblat menerbitkan buku berjudul *Bandung; Kilas Peristiwa di Mata Filatelis, Sebuah Wisata Sejarah* karya Sudarsono Katam Kartodiwirio. Buku yang cukup tebal ini merekam perjalanan Kota Bandung dari waktu ke waktu dari kacamata seorang filatelis. Disusun dengan model kompilasi data, buku ini sangat kaya dengan data historis tentang Kota Bandung, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Buku ini lebih menyerupai sebuah album Kota Bandung yang dalam bidang tertentu diberi uraian secara tematis-kronologis. Dengan demikian, buku ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji morfologi kota secara komprehensif, hanya menyediakan data historis yang bisa dipergunakan untuk kajian morfologi kota.

Pada 2015, penulis kembali ikut terlibat dalam penelitian sejarah Kota Bandung yang dipimpin oleh Nina Herlina. Hasil penelitian kemudian diterbitkan pada 2016 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dengan judul *Sejarah Kota Bandung*. Buku ini lebih komprehensif karena membahas Kota Bandung sejak masa prasejarah hingga masa kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil. Oleh karena bersifat general historis, aspek morfologi kota bukan menjadi fokus kajian utama, melainkan

hanya disinggung sepiintas sebagai bagian perkembangan Kota Bandung secara keseluruhan. Mumuh Muhsin menulis sebuah artikel yang berjudul “Dinamika Sosial-Ekonomi Priangan Abad Ke-19 yang diterbitkan oleh *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2011. Dalam artikel tersebut, Mumuh menegaskan bahwa sejak menjadi pusat pemerintahan Keresidenan Priangan, Bandung tumbuh menjadi kota yang tidak hanya berstatus sebagai pusat aktivitas politik, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Akan tetapi, persoalan kebutuhan tata ruang kota tidak disinggung karena artikel ini tidak ditulis untuk menggambarkan perubahan fisik Kota Bandung setelah menjadi pusat pemerintahan Keresidenan Priangan.

Pada 2015, Udjiyanto Pawitro menulis sebuah artikel yang berjudul “Peningkatan Aspek ‘Keindahan Kota’ (*The Urban Esthetic*) di Kawasan Pusat Kota: Studi Kasus Kawasan Pusat Kota Bandung, Jawa Barat”. Tulisan yang diterbitkan dalam *Jurnal Media Matrasain*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2015 tersebut, menganalisis upaya mempercantik kawasan pusat Kota Bandung melalui kegiatan arsitektur kota atau rancang kota. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai respons atas adanya tuntutan dari masyarakat terhadap kecantikan kotanya sebagai dampak perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat perkotaan di era informasi. Kecantikan kota, dalam pandangan mereka, akan sangat berpengaruh dalam menaikkan gengsi kotanya secara global. Tulisan ini merupakan tulisan arsitektur lanskap sehingga tidak berbicara secara kronologis mengenai perubahan kawasan pusat Kota Bandung. Oleh karena itu, artikel Udjiyanto Pawitro berbeda dengan tulisan ini karena artikel tersebut tidak dimaksudkan untuk memaparkan perubahan *urban esthetic* secara historis. Ari K. M. Tarigan (dkk.) menulis sebuah artikel berjudul “Bandung City, Indonesia” yang diterbitkan dalam jurnal *Cities; The International Journal of Urban Policy and Planning*, vol. 50, Februari 2016. Dalam artikelnya (hlm. 100-110), Tarigan menguraikan profil Kota Bandung yang meliputi perkembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan hubungan antara-wilayah di cekungan Bandung dalam konteks perencanaan tata ruang kota. Dengan demikian, Tarigan mengemas analisisnya secara sinkronis, sedangkan tulisan ini bersifat diakronis.

Dengan mengacu pada studi terdahulu, pertumbuhan morfologi Kota Bandung yang dikaji secara historis sangat menarik diteliti karena hasilnya akan memiliki nilai penting, khususnya berkaitan dengan gambaran atau model tata ruang kota. Selain itu, gambaran Kota Bandung sebagai kota yang berkarakter akan bisa dimunculkan dari masa ke masa dalam bentuk visualisasi simbol-simbol kota yang diciptakan sesuai dengan jiwa zamannya.

II METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yakni “*The process of critically examining and analyzing the records and survivals of the past. The imaginative reconstruction of the past from the data derived by the process is called historiography*” (Gottschalk, 1968: 48). Dalam tataran operasional, metode sejarah dilakukan dalam empat tahap. Pertama *heuristik* yakni proses mencari, menemukan, dan menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok masalah. Heuristik merupakan sebuah proses pencarian dan penghimpunan sumber data atau informasi yang bisa didapatkan dari sumber-sumber sejarah² yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda atau artefak (Gottschalk, 1968:35-36; Kuntowijoyo, 1995: 94-95;

2 G. J. Renier (1997: 104) membagi sumber sejarah menjadi dua yakni sumber material dan immaterial. Sumber material merupakan terdiri dari sumber tertulis dan sumber tidak tertulis, sedangkan sumber immaterial merupakan semua jejak yang tidak kentara yang masih hidup di masyarakat. Dengan demikian, *oral tradition* dan *oral history* merupakan sumber sejarah immaterial.

Herlina, 2008: 7). Heuristik dilakukan untuk menilai keadaan sumber dan kekuatan bukti sumber yang ditemukan (Garraghan, 1957: 34) yang hasilnya berupa klasifikasi sumber berdasarkan asal-usulnya, yakni sumber primer³ maupun sekunder.⁴

Heuristik dilakukan di berbagai lembaga penyimpanan sumber tertulis. Di Jakarta, heuristik dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Di Bandung, heuristik dilakukan antara lain di Perpustakaan Pusat TNI Angkatan Darat, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran. Sementara itu, di negeri Belanda, heuristik dilakukan di beberapa tempat, antara lain di *Universiteitsbibliotheek Leiden*, *Bibliotheek Museum Volkenkunde* (Leiden), *Nationaal Archief* (Den Haag), *Koninklijk Bibliotheek* (Den Haag), dan *Tropenmuseum Royal Instituut* (Amsterdam). Heuristik pun dilakukan dengan kegiatan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan tujuan menghimpun data tinggalan sejarah yang masih ada di Kota Bandung.

Pada saat sumber sejarah telah terhimpun, proses metode sejarah berlanjut dengan melakukan kritik sumber baik kritik ekstern (untuk menentukan otentisitas sumber) maupun kritik intern (untuk menentukan kredibilitas sumber) (Garraghan, 1957: 174-177; Gottschalk, 1968: 82-86; Herlina, 2008: 28-29). Hasil kritik tersebut adalah fakta sejarah yang kemudian diinterpretasi yakni proses menafsirkan baik secara verbalistik, teknis, faktual, logis, maupun psikologis (Garraghan, 1957: 321-325; Herlina, 2008: 36-55). Hasil penafsiran tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah kisah sejarah yang ditulis secara kronologis yang lazim disebut historiografi. Dalam historiografi diperlukan perhatian terhadap proses seleksi dan imajinasi sehingga penjelasan historis yang dihasilkan dapat memadai (Abdullah, 1984: 92; Gottschalk: 1968: 33; Herlina, 2008: 12; Kuntowijoyo, 1995: 103; Renier, 1997: 194;).

Untuk mendapatkan eksplanasi sejarah, kajian ini menggunakan pendekatan morfologi kota.⁵ Morfologi perkotaan mempelajari perkembangan bentuk fisik di kawasan perkotaan, yang tidak hanya terkait dengan bangunan, tetapi juga sistem sirkulasi, ruang terbuka, dan prasarana perkotaan.⁶ Wujud fisik kota tersebut merupakan manifestasi visual dan parsial yang dihasilkan dari interaksi komponen-komponen penting pembentuknya yang saling mempengaruhi satu sama lainnya (Sunaryo dan

3 Sumber primer (*primary sources*) adalah apabila sumber atau penulis sumber menyaksikan, mendengar sendiri (*eye-witness* atau *ear-witness*), atau mengalami sendiri peristiwa yang dituliskan dalam sumber tersebut. Artinya, sumber hidup sezaman dengan peristiwa itu sendiri (Herlina, 2008). Sumber primer dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer yang kuat (*strictly primary sources*) yakni sumber yang berasal dari para pelaku peristiwa atau saksi mata; dan sumber primer yang kurang kuat (*less-strictly primary sources*) atau sumber sejaman (Garraghan, 1957: 106-108).

4 Sumber sekunder adalah apabila sumber atau penulis sumber hanya mendengar peristiwa dari orang lain. Ia juga tidak hidup sezaman dengan peristiwa itu sendiri dan telah mengalami pengolahan terlebih dahulu. Contohnya, buku-buku, artikel-artikel, hasil kajian tentang suatu peristiwa, orang yang pernah mendenagr suatu peristiwa dari orang lain yang menjadi pelaku sejarah (Herlina, 2008: 12-13).

5 Weishguna dan Ernady Saodih (2007: 60) mengatakan bahwa morfologi merupakan kata bentukan dari morf 'bentuk' dan logos 'ilmu' sehingga mengandung pengertian sebagai ilmu yang mempelajari produk bentuk-bentuk fisik kota secara logis. Morfologi merupakan pendekatan dalam memahami bentuk logis sebuah kota sebagai produk perubahan *sosio-spatial*. Dalam konteks penulisan historis, morfologi kota merupakan sebuah pendekatan untuk mengkaji pertumbuhan fisik Kota Bandung.

6 Berdasarkan tipologi bangunan, wujud fisik kota dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu (1) bentuk kompak yang dapat berbentuk *the square cities*, *the rectangular cities*, *fan shaped cities*, *rounded cities*, *ribbon shaped cities*, *octopus/star shaped cities*, dan *unpatterned cities*; dan (2) bentuk tidak kompak yang dibedakan menjadi *fragmented cities*, *chained cities*, *split cities*, dan *stellar cities* (Tallo [dkk.], 2014: 215).

Ikaputra, 2014). Moudon (2003) menjelaskan bahwa morfologi kota merupakan studi mengenai bentuk kota yang sangat berkaitan erat dengan pendekatan sejarah karena bentuk fisik kota tidak dapat disangkal berakar pada kedinamisan semua lingkungan perkotaan. Dengan perkataan lain, untuk memahami pertumbuhan morfologi kota, mutlak diperlukan pendekatan historis karena lingkungan fisik kota Bandung yang saat ini mewujudkan tidak dapat dilepaskan dari dinamika masa lalunya.

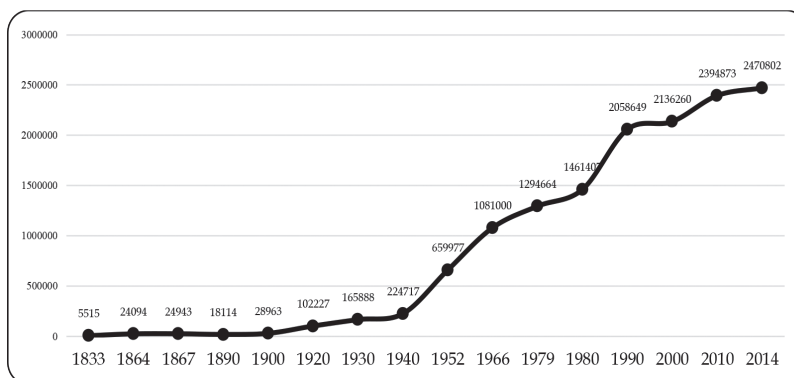
III HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara morfologis, pada abad ke-19, Kota Bandung tumbuh secara dinamis. Dari sebuah kampung yang dikelilingi hutan belantara, Bandung menjelma menjadi sebuah metropolitan yang modern, tetapi dalam batas-batas tertentu masih mempertahankan ciri kota tradisional dan kota kolonial. Pembahasan tentang pertumbuhan morfologi Kota Bandung akan difokuskan pada tiga aspek, yaitu kependudukan dan luas wilayah, ruang terbuka, serta simbol kota.

3.1 Kependudukan dan Luas Wilayah

Salah satu aspek penting dalam morfologi kota adalah masalah kependudukan. Hal ini disebabkan bahwa secara fisik kota harus mampu menampung penduduk sehingga perluasan wilayah acapkali menjadi solusi. Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Migrasi merupakan salah satu faktor dari kondisi tersebut karena kedudukan Bandung sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat sosio-budaya, tentu sangat menarik kaum urban untuk mendatangi Kota Bandung.

Grafik 1: Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung 1833 – 2014



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 1999: 35; Hardjasaputra, 1999: 127; Kantor Sensus dan Statistik Jawa Barat, 1972: 2; Kantor Statistik Provinsi Jawa Barat, 1980: 12; Lith, 1917: 98; Mooi Bandoeng, 1940; Reitsma, 1925; Sensus Penduduk (SP) di Jawa Barat, 1980-2010 dalam <http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/42>; Statistik Daerah Kota Bandung Tahun 2015, 2015; Volksteling, 1930.

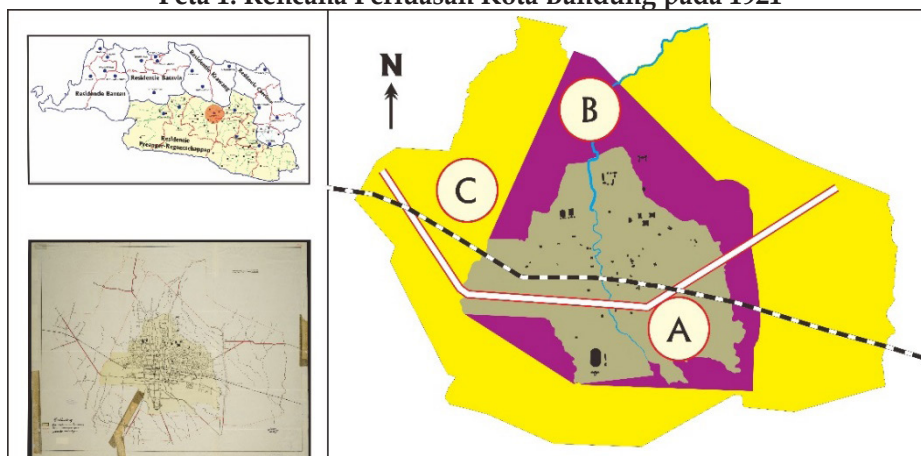
Dari grafik 1, dapat dilihat bahwa dari jumlah 18.114 jiwa pada 1890, penduduk Kota Bandung menjadi 2.470.802 jiwa pada 2014. Rata-rata pertambahan penduduk Kota Bandung pada 1833-1940 mencapai angka 37,15% per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertambahan penduduk Kota Bandung dalam kurun waktu itu sangat tinggi. Ledakan penduduk pertama terjadi dalam kurun waktu 1900-1920 seiring dengan penetapan rencana Kota Bandung sebagai pusat Pemerintahan

Hindia Belanda menggantikan Batavia. Ledakan penduduk kedua terjadi dalam kurun waktu 1940-1952 dengan pertambahan penduduk mencapai angka 193,69%.

Namun demikian, dalam kurun waktu ini, rata-rata pertambahan penduduk Kota Bandung mencapai angka 16,14% per tahun sehingga jauh lebih rendah dibandingkan periode 1833-1940. Pada 1966, penduduk Kota Bandung melebihi 1 juta jiwa dan pada 1990 menembus angka lebih dari 2 juta jiwa. Akan tetapi, rata-rata pertambahan penduduk dalam kurun waktu 1966-2014, mencapai angka 4,43% per tahun. Dengan perkataan lain, rata-rata pertambahan penduduk Kota Bandung dalam kurun waktu itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan dua periode sebelumnya. Meskipun demikian, jumlah penduduk sebanyak itu akan sangat memengaruhi terhadap kemampuan fisik kota mengingat keterbatasan luas wilayah Kota Bandung.

Ketika Bandung dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bandung pada 25 September 1810, tidak dapat diketahui dengan pasti luas wilayahnya. Luas wilayah Kota Bandung baru diketahui sejak ditetapkan sebagai *gemeente* pada 1 April 1906, yakni sekitar 900 hektar persegi dan pada akhir 1906, luas wilayahnya menjadi 1.922 hektar persegi. *Gemeente* Bandung terdiri dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Bandung Kulon yang meliputi delapan desa (Andir, Citepus, Pasar, Cicendo, Suniaraja, Karanganyar, dan Regol); Kecamatan Bandung Wetan yang meliputi enam desa (Balubur, Kejaksaan, Lengkong, Kosambi, Cikawao, dan Gumuruh) (*Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng over de Jaren 1906/1918, 1919: 3*).

Peta 1: Rencana Perluasan Kota Bandung pada 1921

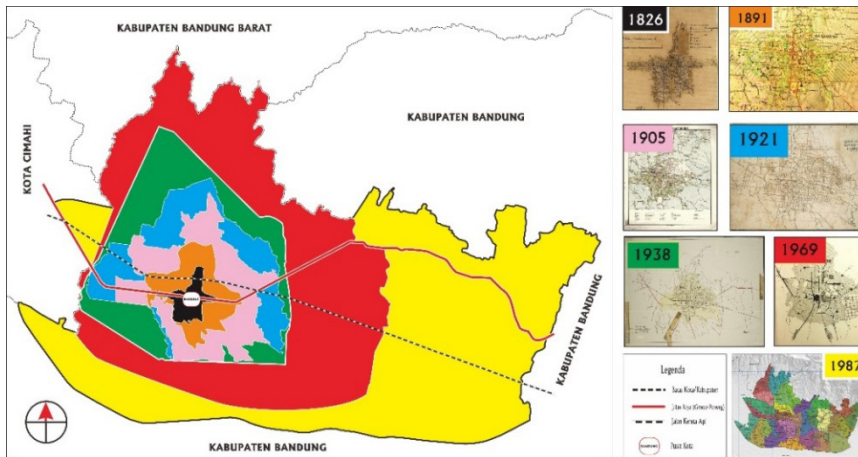


Keterangan: (A) Batas Wilayah Kota Bandung sebelum 1921; (B) Batas Wilayah Kota Bandung pada 1921; (C) Daerah Penyangga (Rencana Perluasan) Wilayah Kota Bandung Sumber: Direkonstruksi dari *Bandoeng*. 1921. *Coloniaal Collection* (KIT). Nr. Inv. KK 161-05-08. Universiteitsbiblio-theek Leiden.

Pada 1911, batas wilayah *Gemeente* Bandung berubah seiring dengan dimasukkannya Kecamatan Cipaganti dan Bojolongloa (Utara) dan daerah sekitar *Riouwstraat* (Jln. Riau) dan Cihaurgeulis ke dalam wilayah *Gemeente* Bandung. Hingga tahun 1916, wilayah *Gemeente* Bandung diperluas sekitar 228 hektar atau bertambah sekitar 11,87% dari luas tahun 1906. Perluasan wilayah *Gemeente* Bandung terus dilakukan mengingat semakin bertambahnya penduduk sehingga memerlukan ruang lebih luas lagi untuk beraktivitas. Sampai tahun 1921, wilayah *Gemeente* Bandung memiliki luas sekitar 2.853 hektar (Hardjasaputra [dkk.], 2000: 14)

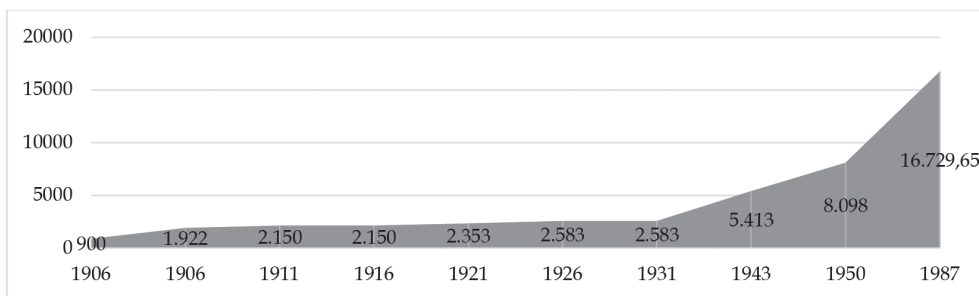
atau meningkat sekitar 48,36% dari luas wilayah tahun 1906 (Hardjasaputra [dkk.], 2000: 15), sebagaimana terlihat pada peta 1 dan peta 2.

Peta 2: Wilayah Kota Bandung pada 1826-1987



Sumber: *Negorij Bandoeng*. Bundel Arsip F. de Haan. No. A.71. Jakarta: ANRI; *Map of Bandoeng*. 1927. Coloniaal Collection (KIT). Nr. Inv. KK 161-05-09. Universiteitsbibliotheek Leiden

Pertumbuhan Kota Bandung yang dinamis dengan penambahan penduduk yang cukup tinggi memerlukan suatu perencanaan bagi perluasan wilayah dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pada 1930, Thomas Karsten menyusun proposal rencana perluasan wilayah Kota Bandung untuk selama 25 tahun ke depan (1930-1955) yang kemudian dikenal dengan nama *Karstenplan*. Karsten berpandangan bahwa pada 1955, dengan asumsi penduduk berjumlah 750.000 jiwa, Kota Bandung harus memiliki wilayah seluas 12.758 hektar persegi (Hardjasaputra [dkk.], 2000: 15). Dengan perkataan lain, diperlukan perluasan wilayah kota sekitar 17,89% per tahun dari luas wilayah tahun 1931. Pemerintah Gemeente Bandung merespons *Karstenplan* tersebut dengan membentuk *Commissie voor de Bevordeeling van de Uitbreidingsplannen der Gemeente Bandoeng* (Komisi Penilai Rencana Pemekaran Gemeente Bandung). Komisi menilai bahwa Bandung Utara merupakan wilayah perluasan Kota Bandung karena memenuhi persyaratan baik secara politis, geografis, maupun ekologis. Untuk itu, komisi memberikan beberapa rekomendasi kepada Walikota Bandung B. Coops, yaitu (1) perlu dibangun beberapa pasar di Kosambi, Cicadas, dan Kiaracandong untuk wilayah Bandung Timur; di Ciroyom dan Andir untuk wilayah Bandung Barat; serta di Tegallega dan Pungkur untuk wilayah Bandung Selatan; (2) pembangunan prasarana dan penyebaran penduduk harus seimbang; (3) pusat perdagangan harus diurai di beberapa pasar; dan (4) perlu dibangun halte kereta api agar tidak seluruh penumpang turun di stasiun Bandung (Kunto, 1984: 41; Hardjasaputra [dkk.], 2000: 15; *Gemeenteraad Bandoeng*, 1919).

Grafik 2: Perluasan Wilayah Administrasi Kota Bandung

Sumber: *Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng over de Jaren 1906/1918, 1919*; Basoeni, 1956; Indonesia, 1987.

Sebagaimana terlihat pada grafik 2, pada akhir kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, luas wilayah Kota Bandung sekitar 3.305 hektar (Hardjasaputra [dkk.], 2000: 15). Pembangunan kawasan Bandung Utara tidak dapat dilanjutkan karena karena sejak 8 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan wilayah Kota Bandung kepada Kekaisaran Jepang. Selama masa kekuasaan Pemerintah Jepang, luas wilayah Kota Bandung bertambah menjadi 5.413 hektar (1943), lihat peta 2. Dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, pada 1950 wilayah Kota Bandung diperluas hingga mencapai 8.098 hektar (Hardjasaputra [dkk.], 2000: 15). Pada 8.695 hektar atau bertambah 597 hektar dari luas wilayah tahun 1950. Perluasan wilayah Kota Bandung dilakukan juga pada 1969 dan terakhir pada 1987 sehingga sampai saat ini, luas wilayah Kota Bandung sekitar 16.731 hektar.

3.2 Areal Terbangun

Areal terbangun (*built up area*) Kota Bandung menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada saat ditetapkan sebagai *gemeente*, *built up area* Kota Bandung mencapai sekitar 26,67% dari luas wilayahnya. Pada 1921, areal terbangun Kota Bandung mencapai sekitar 850 hektar atau meningkat sekitar 223,68% dibandingkan luas area terbangun tahun 1916 (Hardjasaputra [dkk.], 2000: 14). Pada saat ditetapkan sebagai *stadsgemeente*, areal terbangun mencapai 1.050 hektar atau 36,8% dari luas wilayahnya. Lima tahun kemudian (1931), areal terbangun meningkat menjadi 1.300 hektar atau sekitar 45,57% dari total luas wilayah *Stadsgemeente* Bandung. Pada 1950, area terbangun Kota Bandung seluas 1.900 hektar (Hardjasaputra (dkk.), 2000: 15). Pertumbuhan Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya membawa konsekuensi terhadap kebutuhan gedung perkantoran, pusat perdagangan, kebudayaan, dan tentu saja perumahan. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, perkantoran dibangun di pusat kota dengan arsitektur khas Eropa. Beberapa bangunan penting antara lain gedung-gedung pemerintahan (rumah Residen Priangan, Kantor Walikota Bandung, Kompleks Gedung Sate), gedung-gedung militer (*Departement van Oorlog*, *Paleis Legercommandant*, *Jaarbeurs*, Lapangan Udara Andir dan sebagainya), gedung-gedung hiburan (*Societet Concordia*), pusat perdagangan (Pasar Baru, Pasar Kosambi, Pasar Caringin, Kawasan Braga, dan sebagainya), pusat pendidikan (gedung *Kweekschool*, gedung MULO, gedung HBS, gedung Mosvia, Kampus THS, dan sebagainya), dan pusat pelayanan kesehatan.

Untuk menunjang aktivitas masyarakat, dibangun prasarana transportasi dan komunikasi, antara lain Stasiun Bandung, Stasiun Cikudapateuh, Kantor Pos, Kantor Telepon, dan sebagainya. Pembangunan kawasan perumahan, pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dibedakan lokasinya bergantung peruntukannya. Perumahan untuk orang-orang Belanda dibangun di beberapa kawasan, antara lain Cilaki, Cibeunying, Dago, *Riouwstraat*, dan Ciumbuleuit. Untuk kalangan masyarakat biasa, beberapa perumahan dengan ukuran kecil dan sederhana dibangun di beberapa kawasan, antara lain di Kawasan Cihapit.

Ketika Indonesia merdeka, pemerintah membangun beberapa kompleks perumahan yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Beberapa kompleks perumahan yang dibangun oleh Perum Perumnas di antaranya Perumnas Sadang Serang. Seiring dengan penduduk yang semakin padat, sedangkan wilayah Kota Bandung tidak dapat diperluas lagi, pemerintah membangun rumah susun sederhana untuk masyarakat menengah ke bawah. Sementara untuk masyarakat menengah ke atas, dibangun apartemen yang dikelola oleh pihak ketiga. Selain pemukiman⁷, areal yang dibangun di Kota Bandung adalah ruang terbuka yakni “any urban ground space, regardless of public accessibility, that is not roofed by an architectural structure” (Stanley et al. 2012: 1089). Secara konseptual, ruang terbuka dibagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka non-hijau⁸ dan ruang terbuka hijau.⁹ Kedua ruang terbuka tersebut merupakan salah satu bagian penting dari pertumbuhan morfologi kota. Ruang terbuka nonhijau antara lain alun-alun, halaman rumah, plasa bangunan ibadah, plasa monumen, dan bawah jembatan/jalan layang. Di Kota Bandung, ruang terbuka nonhijau yang sudah ada sejak masa penjajahan adalah alun-alun, taman rumah bupati (pendopo), lapangan Tegalleja, dan lapangan olah raga (sekarang Lapangan Saparua).

Sementara itu, ruang terbuka hijau sudah dibangun di Kota Bandung sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa taman yang dibangun sampai tahun 1942, antara lain *Pieters Stijhof Park*, *Jubileum Park*, *Insulinde Park*, *Molukken Park*, *Ijzerman Park*, *Tjilaki Plein*, dan *Oranje Plein*. Taman-taman kota tersebut sekarang ada yang masih berfungsi sebagai taman, antara lain *Pieters Stijhof Park* menjadi Taman Balai Kota Bandung, *Ijzerman Park* menjadi Taman Ganesha ITB, *Insulinde Park* menjadi Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution, *Molukken Park* menjadi Taman Maluku, *Tjilaki Plein* menjadi Taman Lansia, dan *Oranje Plein* menjadi Taman Pramuka. Sementara itu, *Jubileum Park* menjadi Kebun Binatang Bandung. Pada masa kepemimpinan Walikota Bandung Ridwan Kamil, keberadaan ruang terbuka hijau baru semakin banyak yang dibangun. Beberapa lapangan terbuka yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda, direvitalisasi menjadi taman kota, dengan memerhatikan fungsi dan nilai estetikanya. Pembangunan taman kota, selain untuk mengejar komposisi

⁷Pada masa penjajahan Belanda, pemukiman lebih dikenal dengan istilah kampung yaitu tempat tinggal masyarakat yang cenderung berkelompok baik berdasarkan etnis maupun komoditas barang yang diperdagangkan (Wijayati, 2016: 188). Turunan atau pecahan dari kampung, biasanya dinamakan babakan.

⁸Ruang Terbuka Non-Hijau adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (Permen PU NO. 12/PRT/M 2009).

⁹Ruang terbuka hijau adalah kawasan permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang berfungsi sebagai perlindungan habitat tertentu dan sarana lingkungan kota atau kawasan perkotaan sehingga bisa dipergunakan untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, serta untuk meningkatkan kualitas lansekap kota (Hakim, 2004)

ideal penggunaan lahan, juga untuk mendukung upaya mewujudkan *Bandung Smart City* dan juga sejalan dengan julukan Bandung sebagai Kota Kembang. Apa yang dilakukannya, tidak terlepas dari upaya mempercantik Kota Bandung sehingga memiliki nilai lebih sebagai salah satu kota modern di Indonesia (Pawitro, 2015).

Peta 3: Ruang Terbuka di Kota Bandung sejak Masa Kolonial Belanda hingga Sekarang



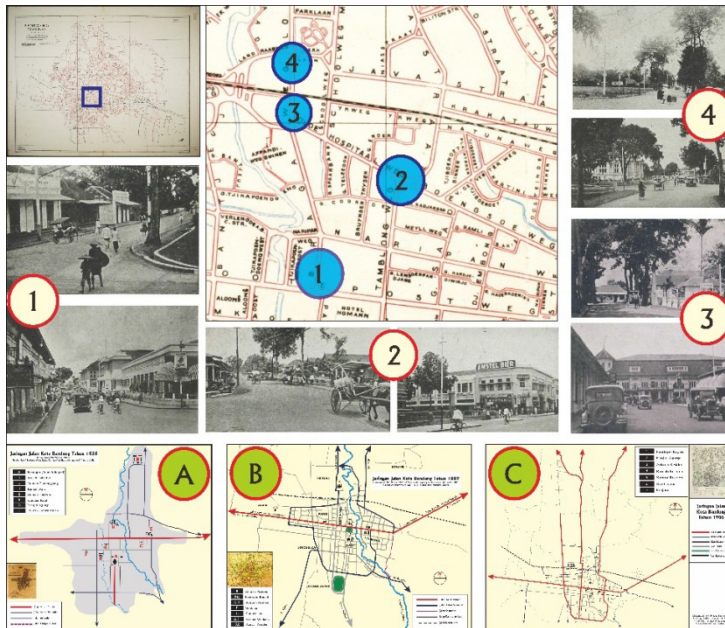
Keterangan : (A) Ijzerman Park - Taman Ganesha; (B) Jubileum Park - Kebun Binatang; (C) Molukken Park - Taman Maluku; (D) Tjilaki Plein - Taman Lansia; (E) Oranje Plein - Taman Pramuka; (F) Militair Stadion - Stadion Siliwangi; (G) Sport Terrein - Lapangan Saparua; (H) Regent Woning - Pendopo; (I) Race Terrein - Lapangan Tegallega; (J) Alon-Alon - Alun-Alun; (K) Pieters Park - Taman Balai Kota; (L) Insulinde Park - Taman Lalu Lintas. Sumber: *Bandoeng Guide Map*. 1946. Coloniaal Collec-tion (KIT). Nr. Inv. KK 162-01-09. Universiteitsbibliotheek Leiden; *Indië; Geïllustreerd Tijdschrift voor Nederland en Koloniën*, 20 April 1921; 18 Augustus 1926; *Groot Bandoeng. Geïllustreerd Maandblad Gewijd aan de Belangen van Bandoeng*. Maart 1922. *Java Bode*. 17 Desember 1955; *Moskee te Bandoeng*. Coloniaal Collection - KIT. No. Inv. 1400364. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden - KITLV Collection; Kartodiwirio, 2006); Dokumentasi Penulis, 2016-2017.

3.3 Simbol Kota

Aspek lain dari kajian morfologi kota adalah berkaitan dengan simbol kota karena berkaitan erat dengan identitas kota. Simbol kota menurut J. M. Nas (1993: 61) merupakan simbol-simbol yang terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengaksesnya. Simbol kota meliputi beragam aspek, antara lain nama jalan, monumen, gerbang kota, lambang kota, atau bangunan. Di Kota Bandung, jalan diberi nama secara berkelompok, terutama jalan-jalan yang tidak masuk ke dalam jalan arteri. Nama-nama jalan bisa diambil dari nama kampung, nama geografis, nama tokoh, atau nama yang terkait dengan peristiwa tertentu. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, jalan-jalan besar dan panjang biasanya diberi nama *weg* atau *laan* di belakang namanya, sedangkan jalan sedang dan pendek diberi nama *straat* di belakang

namanya. Mislanya, jalan yang membelah Kota Bandung dari barat ke timur diberi nama *De Grote Posweg* atau jalan persimpangan *De Grote Posweg* di daerah Kosambi, diberi nama *Papandajanlaan*. Sementara itu, jalan-jalan di sekitar kompleks militer diberi nama geografis seperti *Bilitonstraat*, *Borneostraat*, *Javastraat*, *Atjehstraat*, dan sebagainya. Penamaan tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada para prajurit Hindia Belanda yang berasal dari berbagai daerah di Hindia Belanda. Salah satu jalan yang menjadi ikon Kota Bandung pada awal abad ke-20 adalah *Bragaaweg* (lihat peta 4).

Peta 4: Sirkulasi Jalan di Kota Bandung Tahun 1826-1934

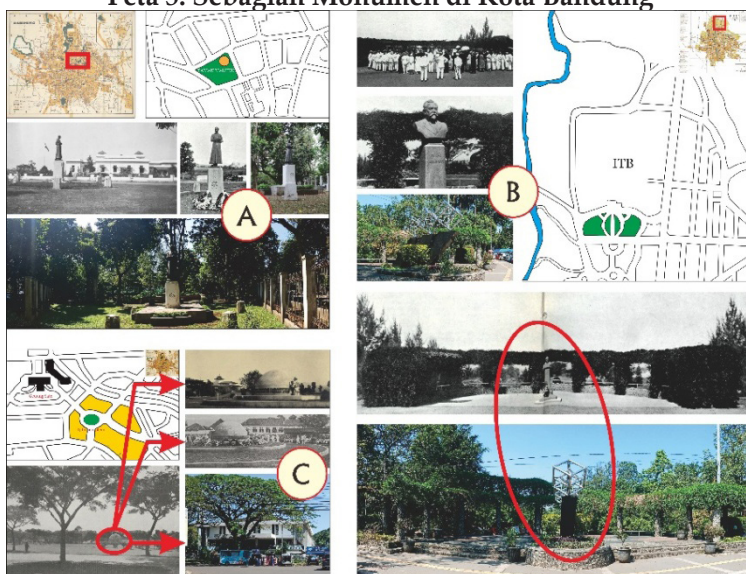


Keterangan : (1) *Groote Posweg hoek Braga*, 1905 & 1931; (2) *Katja-Katja Wetan Hoek Tamblong* (1916 & 1933); (3) *Jalan Braga Bagian Selatan* (1902 & 1931); (4) *Jalan Braga Bagian Utara* (1905 & 1931). (A) Sirkulasi Jalan Tahun 1826; (B) Sirkulasi Jalan Tahun 1899; (C) Sirkulasi Jalan Tahun 1905. Sumber: Direkonstruksi dari *Kaart van de omgeving van Bandoeng en Tjitjalengka*. 1898. *Nummer Archiefinventaris 4, JBF - 1141.3*. Den Haag: *Nationaal Archief*; *Plan der Negorij Bandoeng*, 1826. Koleksi Kartografi de Haan. No. Inv. A.47. Jakarta: ANRI; *Bandoeng*, 1905. *Coloniaal Collectie (KIT)542201 (04850-097)*. Leiden: *Universiteitsbibliotheek Leiden*; (Foto) *Mooi Bandoeng*, 1933-1934.

Pada masa kekuasaan Jepang, penamaan jalan tidak diubah karena Jepang masih fokus pada upaya memenangkan peperangan di Asia-Pasifik. Ketika Indonesia merdeka, penamaan jalan diubah karena sejalan dengan semangat nasionalisme. Perubahan tersebut tidak dilakukan untuk seluruh jalan. *De Grote Posweg*, pada awalnya diubah menjadi *Jalan Raya Barat* dan *Jalan Raya Timur*, kemudian menjadi *Jalan Asia Afrika* dan *Jalan A. Yani*. *Papandajanlaan* kemudian diubah menjadi *Jalan Gatot Soebroto*, *Dagoweg* diubah namanya menjadi *Jalan Ir. H. Djuanda*. *Wilhelminaboulevard* yang terletak di depan Kompleks Gedung Sate, namanya diubah menjadi *Jalan Diponegoro*. Selain itu, *Riouwstraat* kemudian diganti namanya menjadi *Jalan Laks. R. E. E. Martadinata*, *Pasteurweg* diganti dengan *Jalan Dr. Djundjunan*,

Pangeran Soemedangweg diganti menjadi Jalan Oto Iskandar Di Nata, dan sebagainya. Beberapa ruas jalan di kawasan Gedung Sate, tidak berubah namanya, antara lain *Tjilakistraat*, *Cibeunyingstraat*, *Tjitaroemstraat*, dan *Tjisangkoejstraat*. Demikian juga dengan jalan yang berada di kawasan militer, seperti *Manadostraat*, *Sumatrastraat*, *Bangkastraat*, *Ambonstraat*, dan *Seramstraat*. Banyak nama jalan yang menggunakan nama Belanda diubah, terutama nama-nama yang berkaitan dengan politik dan militer. Pemerintah Kota Bandung kemudian mengganti beberapa nama ruas jalan dengan tokoh atau pahlawan nasional. Sementara itu, ruas jalan yang dibangun oleh pemerintah Kota Bandung diberi nama dengan peristiwa yang terkait dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, di antaranya Jalan Lingkar Selatan dibagi menjadi beberapa nama, yaitu Jalan Laswi, Jalan Pelajar Pejuang 45, dan Jalan BKR. Sementara itu, Jalan *By Pass* yang menghubungkan daerah Cibiru dengan Cimahi, kemudian diberi nama Jalan Soekarno-Hatta.

Peta 5: Sebagian Monumen di Kota Bandung



Keterangan: (A) Patung Pastor Verbraak di *Molukkenpark* (Taman Maluku); (B) Patung Dada Ijzerman, sekarang menjadi Taman Ganesha; (C) Monumen Bola Dunia, sekarang menjadi Masjid Istiqomah. (A) Sirkulasi Jalan Tahun 1826; (B) Sirkulasi Jalan Tahun 1899; (C) Sirkulasi Jalan Tahun 1905. Sumber: "Het Monument voor wijlen Dr. Ir. J. C. de Groot". *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*. 35e Jaargang. No. 32. 8 Februari 1930; "Het Stanbeeld voor Pastoor Verbraak te Bandoeng" in *Indië*; *Geïllustreerd Tijdschrift voor Nederland en Koloniën*. 5^{de} Jaargang. No. 50. 15 Maart 1922. Leiden-Harleem; Dokumentasi Budimansyah, September 2017; Dokumentasi Penulis, 5 April 2018; "Het Borstbeeld van Dr. J. W. Ijzerman (Opgericht voor de Technische Hoogeschool) te Bandoeng" in *Indië*; *Geïllustreerd Tijdschrift voor Nederland en Koloniën*. 10^{de} Jaargang. No. 11. 18 Augustus 1926. Leiden-Harleem; Dokumentasi Penulis, 5 April 2018.

Simbol kota lainnya adalah gerbang kota yang pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ditandai dengan kompleks militer atau pos militer. Pada masa NKRI, gerbang kota dibangun sebagai tanda batas dua daerah otonomi yang dibangun secara arsitektural. Gerbang Kota Bandung yang paling "megah" dibangun di wilayah Timur sebagai perbatasan dengan Kabupaten Bandung. Pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil, "gerbang kota" diubah menjadi bergaya tekstual-

grafis dengan membangun teks “Bandung” atau “.bdg” di setiap perbatasan. Monumen merupakan salah satu yang menjadi simbol kota paling mudah untuk dijadikan sebagai identitas kota. Monumen dibangun, selain untuk mengenang suatu peristiwa, tokoh, atau berkaitan dengan sains, juga untuk memperindah kota. Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, Kota Bandung dihiasi oleh beberapa monumen, antara lain Monumen Bola Dunia (untuk memperingati pembangunan jaringan telegram), Patung Dada Ijzerman (salah seorang penggagas berdirinya THS), Patung Pastor Verbraak di *Molukkenpark* (pendeta untuk para prajurit), dan sebagainya. Saat ini, hanya Patung Pastor Verbraak yang masih berdiri tegak, sedangkan yang lainnya sudah hilang (lihat peta 5). Di Kota Bandung pun terdapat beberapa monumen, antara lain monumen yang terkait dengan perjuangan (Patung Husein Sastranegara, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Patung Polisi, Patung Laswi); monumen terkait dengan kebersihan kota (Monumen Adipura), monumen kota kembar atau *sister city*, monumen persimpangan jalan (Monumen Konferensi Asia Afrika, Monumen Sulanjana-Tamansari, Monumen Aceh-Seram), dan monumen olah raga (patung sepakbola di Jalan Tamblong). Monumen-monumen itu menjadi salah satu aspek yang bisa memperindah Kota Bandung sekaligus sebagai salah satu identitas Kota Bandung. Gedung-gedung pemerintahan, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, dan perumahan merupakan simbol kota yang bisa memberikan identitas kota. Gaya arsitektur yang melekat pada bangunan itu merupakan daya tarik tersendiri sehingga dapat menjadi media untuk “bercengkerama dengan masa lampau”. Gedung Sate, Gedung Merdeka dan bangunan lainnya di kawasan alun-alun Kota Bandung merupakan simbol kota yang sudah bersatu dengan kehidupan masyarakat Kota Bandung.

IV PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan Kota Bandung secara morfologis adalah kependudukan. Lonjakan jumlah penduduk yang terjadi di Kota Bandung tidak hanya terjadi secara alamiah, tetapi juga disebabkan faktor migrasi. Urbanisme melanda Kota Bandung karena daya tarik kota ini sebagai pusat ekonomi dan sosio-budaya. Pertambahan penduduk mendorong terjadinya pembangunan secara fisik sehingga banyak lahan tanah yang beralih fungsi. Areal pesawahan atau kebun banyak yang berubah menjadi kawasan pemukiman, perkantoran, dan industri. Selain itu, pembangunan ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau menjadi salah satu upaya untuk menjadikan Bandung sebagai kota metropolitan yang estetik. Sejak masa penjajahan, Bandung “mempercantik diri dengan taman dan bunga. Bandung bukan sekedar sebuah kota tempat masyarakat melakukan interaksi. Bandung adalah kota yang memiliki identitas diri yang dimanifestasikan dengan beragam simbol kota. Penamaan jalan disesuaikan dengan karakter masyarakat Bandung. Pembangunan beragam monumen merupakan simbolisasi terhadap aktivitas dan kreatifitas masyarakatnya. Monumen dibangun bukan hanya dalam bentuk patung tokoh tertentu, melainkan juga berupa bangunan yang memiliki makna sebagai petunjuk jalan, apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih, penghargaan terhadap perjuangan kemerdekaan, harapan masa depan, dan kreativitas dalam lingkup modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

- "Het Borstbeeld van Dr. J. W. Ijzerman (Opgericht voor de Technisische Hoogeschool) te Bandoeng" in *Indië; Geïllustreerd Tijdschrift voor Nederland en Koloniën*. 10^{de} Jaargang. No. 11. 18 Augustus 1926. Leiden-Harleem.
- "Het Stanbeeld voor Pastoor Verbraak te Bandoeng" in *Indië; Geïllustreerd Tijdschrift voor Nederland en Koloniën*. 5^{de} Jaargang. No. 50. 15 Maart 1922. Leiden-Harleem.
- Bandoeng Guide Map*. 1946. Coloniaal Collection (KIT). Nr. Inv. KK 162-01-09. Universiteitsbibliotheek Leiden; *Bandoeng Town Plan*. 1945. Coloniaal Collection (KIT). Nr. Inv. KK 162-01-10. Universiteitsbibliotheek Leiden; *Bandoeng*. 1921. Coloniaal Collection (KIT). Nr. Inv. KK 161-05-08. Universiteitsbibliotheek Leiden; *Bandoeng*. 1935. Coloniaal Collection (KIT). Nr. Inv. KK 162-01-04. Universiteitsbibliotheek Leiden; *Kaart van Bandoeng*. 1927. Coloniaal Collection (KIT). Nr. Inv. KK 161-01-02. Universiteitsbibliotheek Leiden; *Negorij Bandoeng*. Bundel Arsip F. de Haan. No. A.71. Jakarta: ANRI.
- BPS Propinsi Jawa Barat. 1999. *Jawa Barat Dalam Angka 1998*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- de Klein, Jacob Wouter. 1931. *Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn Nawerking*. Delft: de NV Technische Boekhandel en J. Waltman Jr.
- Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. Vol. I & II. New York: Fordham University Press.
- Gemeenteraad Bandoeng. 1919. *Uitsbreidingsplan Noord-Bandoeng*. Bandoeng: M. J. Vorkink
- , 1919. *Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng over de Jaren 1906/1918*.
- Gottschalk, Louis. 1968. *Understanding History; A Primer of Historical Method*. 2nd Edition. New York: Albert de Knopf.
- Hakim, Rustam. 2004. *Arsitektur Lansekap, Manusia, Alam dan Lingkungan*. Jakarta: FALTL Universitas Trisakti.
- Hardjasaputra, A. Sobana dkk. 1999. *Sejarah Kota Bandung Periode 1906-1945*. Bandung: Pemkot Bandung
- Herlina, Nina dkk. 2015. *Sejarah Kota Bandung*. Bandung: Kapusarda Kota Bandung.
- Herlina, Nina. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Het Monument voor wijlen Dr. Ir. J. C. de Groot". *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*. 35e Jaargang. No. 32. 8 Februari 1930.
- Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Nomor 12/PRT/M 2009*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum
- Kantor Sensus & Statistik Jawa Barat. 1972. *Statistik Jawa Barat Tahun 1971*. Bandung
- Kantor Sensus & Statistik Jawa Barat. 1980. *Statistik Jawa Barat Tahun 1979*. Bandung.
- Kartodiwirio, Sudarsono Katam. 2006, *Bandung; Kilas Peristiwa di Mata Filatelis, Sebuah Wisata Sejarah*. Bandung: Kiblat.
- Kunto, Haryoto. 1985. *Wajah Bandung Tempo Doeloe*. Bandung: Granesia.
- , 1986. *Semerbak Bunga di Kota Bandung*. Bandung: Granesia.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Mooie Bandoeng*, July 1940. 9^{de} Jaargang. No. 7.
- Moskee te Bandoeng*. Coloniaal Collection – KIT. No. Inv. 1400364. Leiden: Bibliotheek Universiteit Leiden - KITLV Collection.
- Moudon, A.V. 2003. 'A Catholic Approach to Reorganizing what Urban Designers

- Should Know' dalam Cuthbert, A.R., (ed). *Designing Cities, Critical Readings in Urban Design*. Malden: Blackwell Publishing. Hal 362-386.
- Muhsin, Mumuh. "Dinamika Sosial-Ekonomi Priangan Abad Ke-19" dalam *Jurnal Sosio-humaniora*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2011.
- Nash, Peter J. M. (ed.). 2011. *Cities Full of Sym-bols; A Theory of Urban Space and Culture*. Leiden: Leiden Universiteit Press.
- Pawitro, Udjiyanto. "Peningkatan Aspek 'Keindahan Kota' (*The Urban Esthetic*) di Kawasan Pusat Kota; Studi Kasus Kawasan Pusat Kota Bandung, Jawa Barat" dalam *Jurnal Media Matrasain*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2015.
- Pemerintah Kota Bandung. 2015. *Statistik Daerah Kota Bandung Tahun 2015*. Bandung: BPS Kota Bandung.
- Regentswoning te Bandoeng*. Coloniaal Collection - KIT. No. Inv. 1400283 dan 3463. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden - KITLV Collection.
- Reitsma, S.A. 1925. *Bandoeng the City Mountain of Netherlands Indie*. Weltevreden: G. Kolff & Co.
- Renier, G. J. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Terj. Muin Umar. Yogyaarta: Pustaka Pelajar.
- Sensus Penduduk (SP) di Jawa Barat, 1980-2010 dalam <http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/42>
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1864. 18; 1926. 365.
- Stanley, Benjamin W. *et al*. "Urban Open Spaces in Historical Perspective: A Transdisciplinary Typology and Analysis" in *Urban Geography*, 2012, 33, 8, pp. 1089, <http://dx.doi.org/10.2747/0272-3638.33.8.1089>. Bellwether Publishing, Ltd
- Sunaryo, Rony Gunawan dan Ikaputra. 2014. "Pengaruh Kolonialisme pada Morfologi Ruang Kota Jawa Periode 1600-1942" dalam *Prosiding Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perencanaan (SERAP) 3*. Yogyakarta: UGM.
- Tallo, Amandus Jong; Yulia Pratiwi; dan Indri Astutik. "Identifikasi Pola Morfologi Kota (Studi Kasus : Sebagian Kecamatan Klojen, Di Kota Malang)" dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 25. No. 3. Desember 2014. Hlm. 213-227. SAPPK ITB.
- Tarigan, Ari K. M. (dkk.). "Bandung City, Indonesia" dalam *Cities; The International Journal of Urban Policy and Planning*. Vol. 50. February 2016. Hlm. 100-110.
- Van der Chjis, J. A. 1880. *Babad Tanah Pasundan*. Terj. Raden Karta Winata. Batavia: Kantor Citak Gupernemen.
- van der Lith, P. A.; A. J. Spaan; F. Fokkens. 1917. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. 'sGravenhage: Martinus Nijh.
- Volkstelling 1930 Inheemsche Bevolking Van West-Java/Departement Van Landbouww*. 1933.
- Wawancara dengan Ridwan Kamil, Maret 2016 di Balaikota Bandung.
- Wieshaguna dan Ernady Saodih. "Morfologi sebagai Pendekatan Memahami Kota". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba*. Vol. 7 Nomor 2. Agustus 2007.
- Wijayati, Putri Agus. "Relasi Pasar, Negara, dan Masyarakat: Kajian pada Ruang Perkotaan Semarang Awal Abad Ke-20" dalam *Paramita: Historical Studies Journal*. Vo. 26. No. 2. 2016. Hlm. 186-202. Semarang: Unes.